

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pembangunan pangan dan gizi dapat diwujudkan melalui ketahanan pangan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, serta peraturan pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dalam sebuah negara, ketahanan pangan merupakan aspek yang sangat penting terutama bagi negara Indonesia yang memiliki penduduk yang banyak dengan jumlah perkiraan mencapai 282 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Saat ini Indonesia memiliki Undang-undang pangan baru sebagai pengganti undang-undang No. 7 tahun 1996, yaitu Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang berisi tiga aspek diantaranya kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, Undang-undang ini menjadi aransemen sebagai identitas baru dalam kelembagaan pangan Indonesia.

Kebutuhan dasar manusia yang harus dicukup salah satunya yaitu dalam aspek pangan (Saputro, Santoso and Salamah, 2021, hlm. 919). Pangan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dalam mempertahankan hidup, segala sesuatu yang terbentuk dari sumber hayati dan air, baik yang melewati proses pengolahan ataupun tidak sebagai sumber makan dan minum bagi manusia. Karena berfungsi sebagai pemulihan serta perbaikan jaringan tubuh, maka pangan memiliki zat gizi yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup. Pangan juga dapat mengatur setiap proses yang terjadi dalam tubuh agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya.

Setiap manusia berhak memperoleh pangan berupa makanan yang cukup, aman, bergizi dan layak sesuai kebutuhannya. Disamping itu juga, memperoleh pangan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementan RI (2013) dalam (Saputro and Fidayani, 2020, hlm. 116), ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan

pangan dalam setiap keluarga yang cukup ditinjau melalui aspek jumlah, mutu, keamanan, pemerataan dan keterjangkauan. Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan pilar utama karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia.

Menurut *The Economist Intelligence Unit* (EIU) (2018) dalam (Harvian and Yuhan, 2019, hlm. 1053), sistem ketahanan pangan di Indonesia termasuk paling rawan karena terkena dampak dari perubahan iklim seperti suhu yang lebih tinggi serta perubahan pola curah hujan di wilayah Asia Tenggara. Adanya perubahan iklim ini sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, karena dapat mempengaruhi sistem pangan terkait dengan produksi, penyimpanan, akses dan stabilitas harga pangan. Ketahanan pangan dalam suatu wilayah bisa dikatakan berhasil jika meningkatnya jumlah produksi serta distribusi pangan dapat berjalan dengan lancar dan jumlah konsumsi yang cukup untuk memenuhi gizi masyarakatnya.

Langkah tepat yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi ini yaitu dengan melakukan identifikasi mengenai kebutuhan dalam pemenuhan pangan guna mencegah kerawanan pangan. Upaya pencegahan dalam mengatasi hal tersebut harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat serta dapat dikelola dengan baik. Menurut (Fauzi et.,al 2019) dalam (Pujati et al., 2020, hlm. 126), kerawanan pangan dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan pangan.

Tindakan pencegahan atas kerawanan pangan ini dapat diatasi salah satunya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurut (Rodiah, Lusiana and Agustine, 2016, hlm. 6), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah komunitas yang bergerak di tengah masyarakat dan tercipta karena kebutuhan masyarakat. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini merupakan mitra pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga dapat mewujudkan keberdayaan masyarakat salah satunya dalam bidang pangan bagi keluarga. Program pemenuhan kebutuhan pangan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kualitas dan pola konsumsi makanan yang beragam dan bergizi serta pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam

berbagai tanaman pangan dan sayuran, selain itu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga bergerak dalam program percepatan keanekaragaman konsumsi keluarga. Dalam prinsip pemberdayaan, setiap program yang dapat memberikan stimulus bagi keberdayaan masyarakat merupakan program yang sifatnya partisipatif, terencana, dilakukan, terdapat pengawasan dan dievaluasi (Lesnussa and Kunci, 2019, hlm. 98).

Evaluasi yang dikemukakan oleh (Edwind Want dan Galt W. Brown) dalam (Siregar, 2017, hlm. 61) merupakan suatu tindakan dan sebuah proses dalam menentukan nilai terhadap sesuatu. Dalam istilah lain, evaluasi adalah tindakan yang menentukan kondisi mengenai tercapainya suatu tujuan. Pengertian tersebut menerangkan hubungan antara evaluasi serta tujuan dari sebuah kegiatan dengan pengukuran tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam program. Disamping itu, evaluasi juga termasuk dalam proses pemahaman, pengertian, memperoleh dan mengkomunikasikan suatu informasi untuk keperluan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Arikunto dan Jabar, 2009) dalam (Novalinda, Ambiyar and Rizal, 2020, hlm. 139), evaluasi program merupakan kegiatan menjabarkan, menghimpun data serta informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian akan dipakai untuk bahan mempertimbangkan program apakah perlu diperbaiki, disudahi ataupun diteruskan. Dalam setiap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, kegiatan evaluasi harus dilakukan untuk memastikan program tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan memberi dampak dalam masyarakat. Kegiatan evaluasi penting dilakukan untuk menemukan hal-hal yang harus diperbaiki, memastikan manfaat dapat dirasakan secara maksimal bagi sasaran program serta dapat disempurnakan untuk masa depan.

Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan salah satunya terhadap program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pangan di Kelurahan Sumelap. Menurut Laporan Data Kegiatan PKK Kelurahan Sumelap (2023), Kelurahan Sumelap merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang memiliki luas wilayah 281,5 Ha, serta secara administratif terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 33

Rukun Tetangga (RT). Ditinjau dari kondisi demografis, jumlah penduduk Kelurahan Sumelap sebanyak 5.158 jiwa yang terdiri dari 2.689 orang laki-laki serta 2.469 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.641 dengan mayoritas penduduk beragama islam.

Terdapat banyak model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program. Meskipun demikian, tujuan dari setiap model evaluasi adalah untuk mengumpulkan data maupun informasi terkait objek yang akan dievaluasi dengan tujuan sebagai bahan bagi seorang pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut sebuah program. Salah satu ahli evaluasi yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program yaitu model CIPP yang pertama kali dikemukakan oleh Shufflebeam 1970. Menurut Widoyoko (2009: 181) dalam (Mei Istiyani and Ustman, 2019, hlm 7), konsep evaluasi CIPP ini memiliki pandangan bahwa tujuan evaluasi bukan untuk membuktikan, tetapi untuk melakukan perbaikan. Terdapat 4 komponen dalam model evaluasi CIPP yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Kegiatan evaluasi program menggunakan model evaluasi CIPP dianggap lebih komprehensif karena objek pada proses evaluasi tidak hanya terhadap hasil, tetapi mencakup hal lain seperti konteks, masukan, proses dan hasil (Widodo, 2021, hlm 51).

Berdasarkan teori evaluasi program, model evaluasi CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*) akan relevan digunakan dalam mengevaluasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pangan karena dalam menjalankan program ini terdapat kendala dalam beberapa aspek diantaranya dalam *input* anggota PKK dengan tingkat kerja sama yang rendah, serta *process* penanaman yang masih belum terampil dan belum dipahami yang menyebabkan terhambatnya keberlanjutan program tersebut. Model CIPP ini dapat menilai program secara lebih terstruktur dan sistematis dengan mengevaluasi secara menyeluruh mulai dari evaluasi *context* dengan memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan fokus pada perubahan nyata, evaluasi *input* dengan memastikan sumber daya yang digunakan dapat mendukung tujuan program, evaluasi *process* dengan meninjau proses serta identifikasi kendala selama program dijalankan, serta evaluasi *product* dengan

memastikan dampak nyata yang dihasilkan program terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil observasi, di Kelurahan Sumelap masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya ketahanan pangan, sebagian besar lahan pekarangan hanya ditanami tidak produktif karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menanam tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di samping itu, ketahanan pangan merupakan hal mendesak dalam pemberdayaan keluarga karena harus memastikan setiap anggota keluarga untuk memiliki akses yang cukup dalam memperoleh pangan guna menjalankan hidup yang sehat, produktif dan berdaya. Sebenarnya, potensi yang dapat dihasilkan di lingkungan Kelurahan Sumelap dapat dikatakan cukup baik, seperti terdapat lahan yang kosong tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan benar. Dengan adanya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang seringkali melibatkan pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan salah satunya dalam pengelolaan pangan agar masyarakat dapat memahami pentingnya pemenuhan pangan dan cara-cara untuk mencapainya. Melalui program ini, masyarakat diajarkan keterampilan yang relevan dengan bidang pangan seperti budidaya tanaman dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut, setiap keluarga dapat lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan salah satu kegiatan dari 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu program “Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman” yang di dalamnya terdapat kegiatan penanaman tanaman pangan diantaranya jagung, kangkung, seledri, pokcoy, tomat, cabe besar, cabe rawit, kencur dan jahe. Namun dalam menjalankan program tersebut masih terdapat anggota kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang belum memahami terkait teknis pemberdayaan padahal kegiatan ini termasuk dalam program pokok dalam

kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, sehingga kerja sama antar anggota kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) ini masih belum optimal. Oleh karena itu, program tersebut harus dievaluasi untuk meninjau hasil dan tingkat keberhasilannya.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat pangan merupakan salah satu kebutuhan mendesak bagi setiap keluarga terhadap akses makanan yang cukup, aman dan bergizi melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dilakukan evaluasi maka dapat membantu dalam memastikan efektivitas tujuan dalam program tersebut. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk mengetahui apakah program tersebut telah memberikan dampak yang positif atau hanya berjalan ditempat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta memberikan rekomendasi perbaikan apakah program tersebut dapat dilanjutkan, dilanjutkan dengan disempurnakan, perlu dikembangkan atau harus diberhentikan.

Dengan demikian, sesuai dengan permasalahan tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Bidang Pangan** (Studi pada Anggota PKK Berbasis Metode CIPP di Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap teknis dalam menjalankan program.
- b. Rendahnya tingkat kerja sama antar anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program tersebut sehingga keberlanjutannya menjadi terhambat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Bidang Pangan Berbasis Metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*)?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil Evaluasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Bidang Pangan Berbasis Metode CIPP (Studi pada anggota PKK Berbasis Metode CIPP di Kota Tasikmalaya).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam bidang pangan (studi pada anggota PKK Berbasis Metode CIPP di Kota Tasikmalaya), dan diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebuah kontribusi dalam mengembangkan konsep, teori serta ilmu pengetahuan baru. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam mengkaji hasil evaluasi terhadap program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga khususnya dalam bidang pangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah suatu manfaat yang bisa diambil atau diberikan secara langsung. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu penyampaian pengetahuan kepada peneliti dan pembaca terkait evaluasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat.

1) Bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi anggota kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk dapat meningkatkan akses pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber-sumber referensi dan rujukan bagi penelitian yang relevan.

3) Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan dalam aspek pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi wadah aktualisasi keilmuan penulis dengan mengembangkan keterampilan penelitian dalam mengevaluasi program serta menambah pengalaman akademik.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang memberikan penjelasan terhadap semua variabel yang ada dalam penelitian, dengan tujuan untuk memberikan arti secara spesifik agar dapat dimengerti dengan mudah. Dalam penelitian ini bentuk operasionalnya antara lain:

a) Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk melihat efektivitas atau dampak yang dihasilkan dari suatu rancangan program. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai, memahami bagaimana proses dalam melaksanakan program tersebut terhadap hasil yang didapatkan serta meninjau hal-hal yang membutuhkan perbaikan.

b) Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

CIPP merupakan suatu model yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi untuk menentukan nilai atau meninjau dampak yang dihasilkan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari empat komponen yaitu (*Context, Input, Process, Product*).

c) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan peluang atau kesempatan lebih aktif yang seharusnya mereka dapatkan, hal tersebut dapat berupa pengembangan keterampilan, pengetahuan serta potensi yang dimiliki.

d) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan sebuah gerakan yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

e) Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu dari sumber hayati yang digunakan sebagai sumber makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Ketahanan pangan merupakan kondisi tercukupinya segala kebutuhan dasar setiap manusia dengan kuantitas serta kualitas yang baik. Seseorang dikatakan memiliki ketahanan pangan jika dapat memperoleh makanan dengan ketersediaan yang cukup, akses pangan, pemanfaatan pangan serta stabilitas pangan yang baik pula.